



**KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP.11/MEN/2009  
TENTANG  
WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN  
NUSANTARA BRONDONG**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan perikanan ditetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, perlu ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;

- Memperhatikan:
1. Rekomendasi Bupati Lamongan Nomor 523/1142 /413.022/2007, tanggal 26 Nopember 2007 tentang Penetapan Wilayah Kerja dan Operasional (WKOPP) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
  2. Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor 12.19.21.04.4.00024, 12.19.21.04.4.00025 dan 12.19.21.04.4.00026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG.**

- PERTAMA** : Menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang terdiri dari Wilayah Kerja Daratan seluas 19,93 Ha (sembilan belas koma sembilan puluh tiga hektar) dan Wilayah Kerja Perairan seluas 23,40 Ha (dua puluh tiga koma empat puluh hektar) serta Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 3.969 Ha (tiga ribu sembilanratus enam puluh sembilan hektar) dengan batas-batas dalam koordinat geografis dan peta wilayah kerja dan wilayah pengoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk kegiatan pembangunan dan operasional fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan, seperti kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu-rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat kapal bongkar muat antar kapal perikanan, tempat olah gerak kapal perikanan, kegiatan kesyahbandaran, kegiatan bongkar ikan, pelelangan ikan, pengepakan ikan, kawasan industri, kawasan pelayanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, serta fasilitas umum lainnya di kawasan Pelabuhan Perikanan.
- KETIGA** : Wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berupa alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke Pelabuhan Perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, akses jalan menuju Pelabuhan Perikanan dan kawasan pemukiman nelayan.
- KEEMPAT** : Untuk menyelenggarakan fungsi pelabuhan perikanan pada wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ditugaskan untuk:
1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
  2. Menyusun rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
  3. Menyusun rencana induk (*master plan*) pelabuhan perikanan sebagai landasan pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
  4. Meningkatkan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;

5. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
6. Meningkatkan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
7. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
8. Meningkatkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan; dan
9. Mengkoordinasikan kegiatan instansi terkait di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

**Lampiran I** : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.  
Nomor KEP.11/MEN/2009  
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah  
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara  
Brondong.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS  
WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**

A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 19,93 Ha (sembilan belas koma sembilan puluh tiga hektar) dimulai dari titik 1 dengan koordinat :

112° 17' 38,15" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 24,29" LS  
arah Timur Laut ke titik 2 dengan koordinat:

112° 17' 38,72" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 43,85" LS

arah Barat Laut ke titik 3 dengan koordinat:

112° 17' 15,06" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 11,64" LS

arah Timur Laut ke titik 4 dengan koordinat:

112° 17' 18,06" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 04,98" LS

arah Selatan ke titik 5 dengan koordinat:

112° 17' 56,17" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 09,29" LS

arah Barat Daya menyusuri pantai ke titik 6 dengan koordinat:

112° 17' 53,04" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 21,84" LS

arah Barat Daya ke titik 7 dengan koordinat:

112° 17' 47,44" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 23,64" LS

arah Barat Daya ke titik 8 dengan koordinat:

112° 17' 45,49" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 24,78" LS

arah Barat Daya ke titik 9 dengan koordinat:

112° 17' 44,51" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 24,45" LS

arah Barat Daya ke titik 10 dengan koordinat:

112° 17' 43,85" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 26,57" LS

arah Barat Daya ke titik 1 dengan koordinat:

112° 17' 38,15" BT  
-----  
06° 52' 24,29" LS

B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 23,40 Ha (dua puluh tiga koma empat puluh hektar) dimulai dari titik I dengan koordinat:

112° 17' 38,15" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 24,29" LS

arah Timur Laut menuju ke titik II dengan koordinat:

112° 17' 38,72" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 22,01" LS

arah Barat Laut menuju ke titik III dengan koordinat:

112° 17' 15,06" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 11,64" LS

arah Utara menuju ke titik IV dengan koordinat:

112° 17' 15,06" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 50' 00" LS

arah Timur menuju ke titik V dengan koordinat:

112° 19' 30,00" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 50' 00,00" LS

arah Selatan menuju ke titik VI dengan koordinat:

112° 19' 30,00" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 51' 08,45" LS

arah Barat Daya menuju ke titik VII dengan koordinat:

112° 17' 43,85" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 52' 26,57" LS

arah Barat Daya menuju ke titik I dengan koordinat:

112° 17' 38,15" BT

-----  
06° 52' 24,29" LS

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

**Lampiran II :** Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.  
Nomor KEP.11/MEN/2009  
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah  
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara  
Brondong.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS  
WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA  
BRONDONG**

Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong seluas 3.969 Ha (tiga ribu sembilanratus enam puluh sembilan hektar) dimulai dari titik L01 dengan koordinat :

106° 32' 52,200" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
06° 59' 35,365" LS

Barat Laut ke titik L4 dengan koordinat :

106° 32' 51,860" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
06° 59' 35,955" LS

Selatan ke titik L13 dengan koordinat :

106° 32' 41,311" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
06° 59' 47,019" LS

Tenggara ke titik L16 dengan koordinat :

106° 32' 39,710" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
06° 59' 47,301" LS

Utara menyusuri pantai ke titik L29 dengan koordinat :

106° 32' 43,374" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
07° 00' 19,664" LS

Barat ke titik L30 dengan koordinat :

106° 32' 39,947" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
07° 00' 18,752" LS



Barat Laut ke titik L31 dengan koordinat :

106° 32' 37,406" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
07° 00' 17,231" LS

Barat Laut ke titik L32 dengan koordinat :

106° 32' 35,309" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
07° 00' 15,451" LS

Barat Laut ke titik L33 dengan koordinat :

106° 32' 34,267" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
07° 00' 13,856" LS

Barat Laut ke titik L34 dengan koordinat :

106° 32' 33,673" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
07° 00' 11,474" LS

Utara ke titik L36 dengan koordinat :

106° 32' 33,413" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
07° 00' 1,753" LS

Barat Laut ke titik L38 dengan koordinat :

106° 32' 26,724" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
06° 59' 51,743" LS

Barat Laut ke titik L39 dengan koordinat :

106° 32' 25,971" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
06° 59' 47,511" LS

Timur Laut ke titik L40 dengan koordinat :

106° 32' 26,612" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
06° 59' 44,964" LS

Timur Laut ke titik L41 dengan koordinat :

106° 32' 27,777" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 42,950" LS

Timur Laut ke titik L42 dengan koordinat :

106° 32' 28,937" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 41,377" LS

Timur Laut ke da titik L56 dengan koordinat :

106° 32' 48,105" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 24,278" LS

Barat Laut ke titik L08 dengan koordinat :

106° 32' 45,165" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 44,233" LS

Barat Laut ke titik L01 dengan koordinat :

106° 32' 52,200" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 59' 35,365" LS

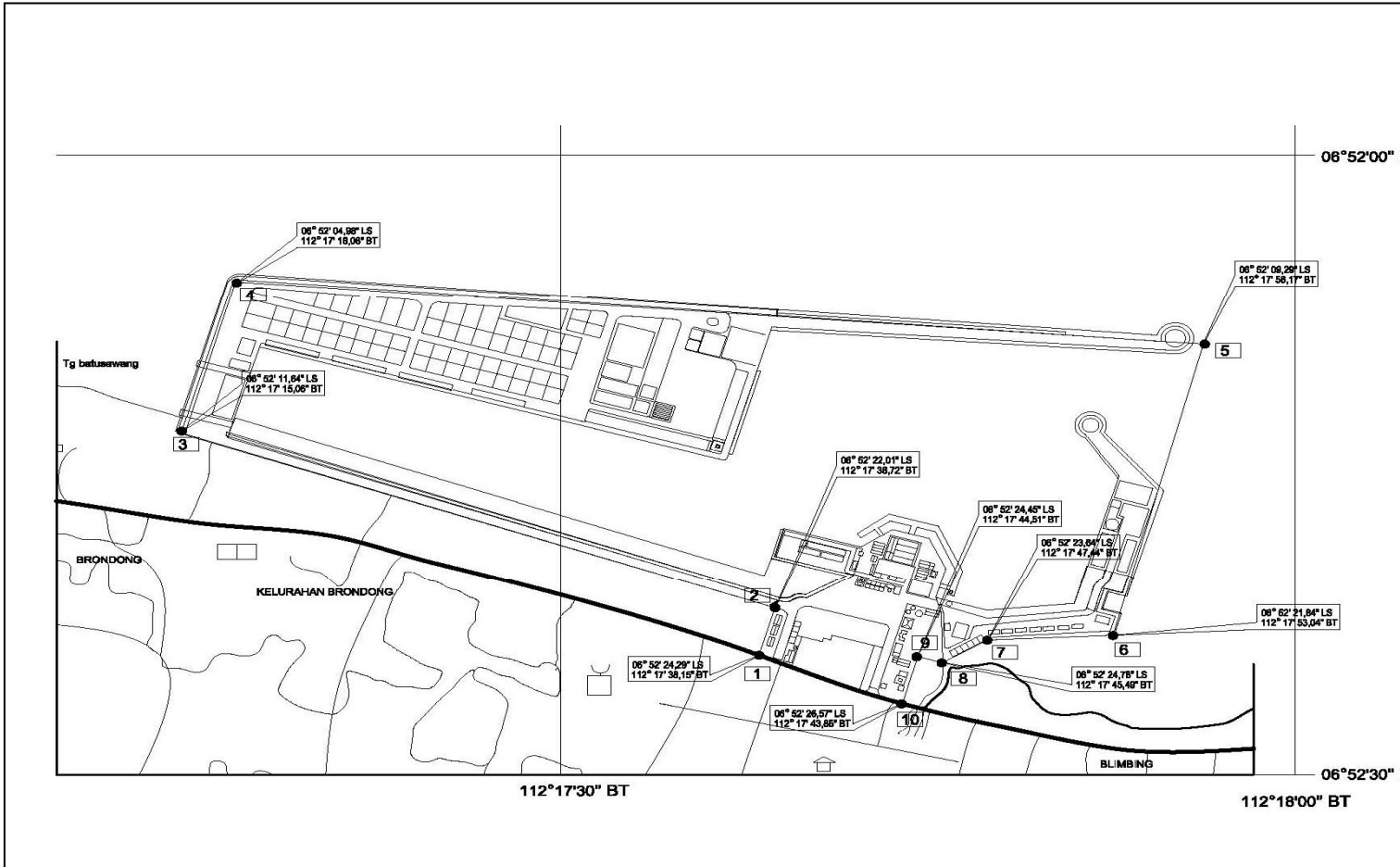
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**FREDDY NUMBERI**

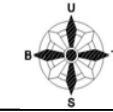


**PETA WILAYAH KERJA  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**



**Keterangan :**

Titik	Koordinat
1	06° 52' 24,29" LS 112° 17' 38,15" BT
2	06° 52' 22,01" LS 112° 17' 38,72" BT
3	06° 52' 11,64" LS 112° 17' 15,06" BT
4	06° 52' 04,98" LS 112° 17' 18,06" BT
5	06° 52' 09,29" LS 112° 17' 56,17" BT
6	06° 52' 21,84" LS 112° 17' 53,04" BT
7	06° 52' 23,64" LS 112° 17' 47,44" BT
8	06° 52' 24,78" LS 112° 17' 45,49" BT
9	06° 52' 24,45" LS 112° 17' 44,51" BT
10	06° 52' 26,57" LS 112° 17' 43,85" BT



Skala :  
1 : 400

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**FREDDY NUMBERI**

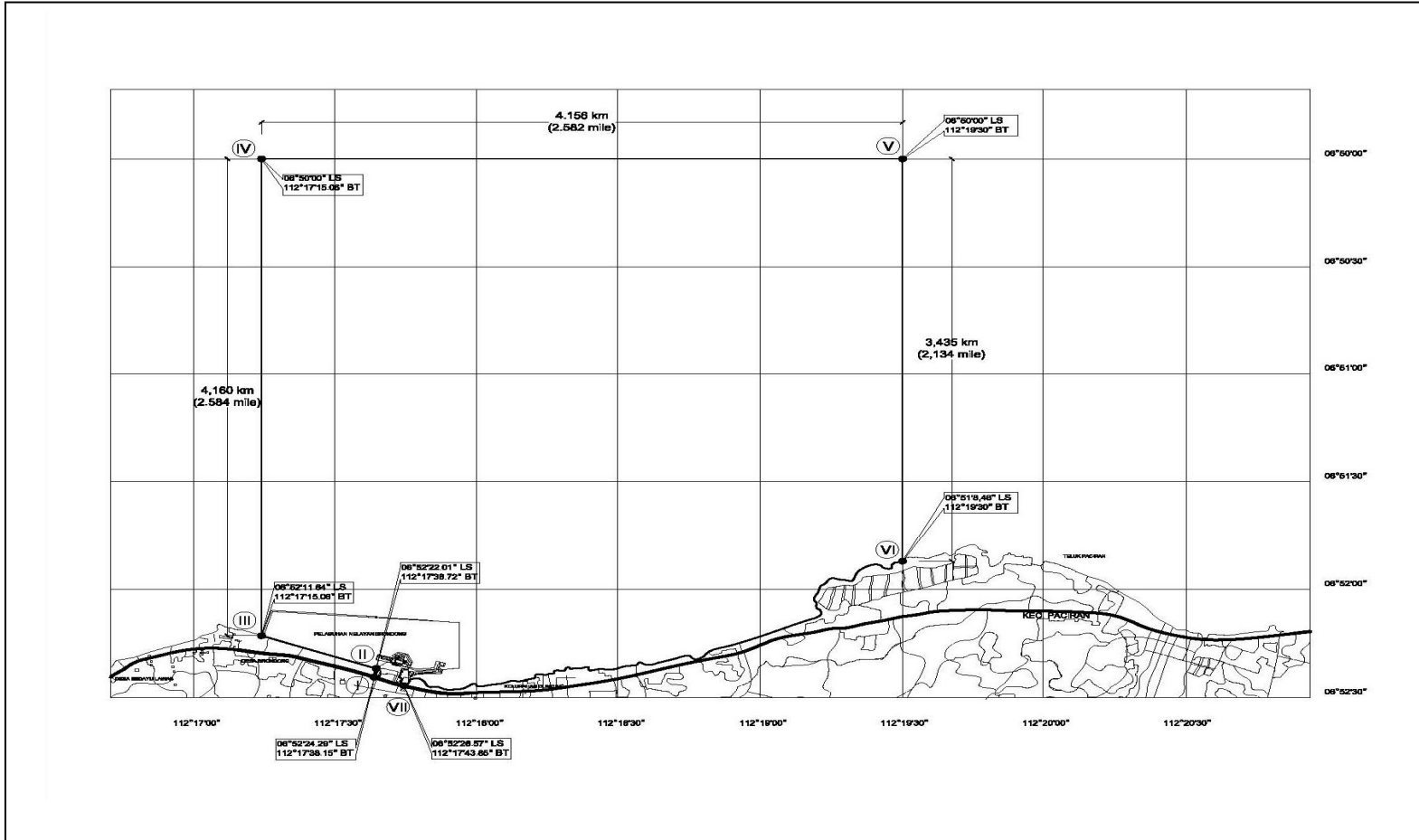
Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

*(Signature)*  
Supranawa Yusuf



Lampiran IV: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.  
 Nomor KEP.11/MEN/2009  
 Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian  
 Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

**PETA WILAYAH PENGOPERASIAN  
 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**



**Keterangan :**

Titik	Koordinat
I	06° 52' 24,29" LS 112° 17' 38,15" BT
II	06° 52' 22,01" LS 112° 17' 38,72" BT
III	06° 52' 11,64" LS 112° 17' 15,06" BT
IV	06° 50' 00" LS 112° 17' 15,06" BT
V	06° 50' 00" LS 112° 19' 30" BT
VI	06° 51' 8,46" LS 112° 19' 30" BT
VII	06° 52' 28,57" LS 112° 17' 43,85" BT

Skala :  
 1 : 400

Disalin sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
 Supranawa Yusuf

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,**  
 ttd.  
**FREDDY NUMBERI**